



12 Feb 2016

Kongkalikong Pansus Bank Maluku



AMBON - Penuntasan kasus Bank Maluku, dinilai hanya berjalan ditempat. Tidak ada progress Pansus Bank Maluku di DPRD Maluku untuk mengungkap mafia perbankan di bank milik pemerintah daerah itu.

Bau busuk di Pansus Bank Maluku mulai menyebar. Selain sejumlah pimpinan Pansus dan anggota Pansus sejak awal diduga masuk angin. Bahkan, wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw pernah mempermasalahkan mekanisme rapat pansus dengan ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae.

Kuat dugaan ada tarik menarik agar Pansus tidak dilanjutkan. "Jadi memang Pansus Bank Maluku itu buang-buang waktu saja. Kenapa demikian, kasus di Bank Maluku itu khan sudah ditangani Kejati Maluku," kata sumber Kabar Timur, kemarin.

Dia menduga, pimpinan Pansus ngotot agar penuntasan kasus Bank Maluku terus berjalan karena kepentingan mereka. "Memang ada kepentingan anggota Pansus lain, tapi kepentingan pimpinan di Pansus itu sangat kental," sebutnya.

Tak hanya itu, dia mengaku, saat rapat perdana Pansus di tahun 2016, hanya diikuti beberapa anggota Pansus. "Mereka (anggota) Pansus tidak sreg lagi dengan keberadaan Pansus. Itu yang menyebabkan rapat perdana itu hanya dihadiri beberapa anggota Pansus," bebarnya.

Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae ketika dihubungi tadi malam soal kelanjutan Pansus Bank Maluku, enggan menanggapi panggilan Kabar Timur. Meski begitu, sebelumnya Huwae menegaskan, pihaknya tetap komitmen menuntaskan kasus Bank Maluku. "Pansus tetap jalan. Buktinya kita baru saja selesai rapat. Kita akan agendakan untuk rapat Pansus lagi," kata Huwae beberapa waktu lalu.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Pansus dibentuk untuk menelusuri pembelian gedung untuk kantor cabang Bank Maluku, di Surabaya, diduga penuh rekayasa dan sarat korupsi. Konon gedung yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, Jawa Timur itu dibeli tahun 2014 lalu sebesar Rp 54 milyar. Kuat dugaan, angka tersebut sengaja dimark-up dan proses pembelian tidak prosedural.

Selain itu pansus yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Edwin A Huwae, juga menyikapi kasus repo saham yang melibatkan PT AAA, merugikan Bank Maluku Rp 262 milyar. Sayangnya, hingga saat ini, gigi Pansus hanya berkoar-koar bak macam ompong. **(KTM)**



Rabu, 24 Februari 2016 06:00

Menteri BUMN Dukung Peralihan Pelabuhan

AMBON - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno mendukung rencana pengalih-fungsian pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon menjadi pelabuhan khusus pariwisata.

“Saya mendukung rencana alih fungsi pelabuhan Yos Sudarso yang selama ini berfungsi sebagai pelabuhan utama di Ambon dan Maluku, khususnya untuk arus bongkar muat barang maupun penumpang,” kata Menteri Rini di Ambon, Selasa (23/2).

Rini berada di Ambon untuk meresmikan kantor cabang Permodalan Nasional Madani (PNM) persero, lembaga non-bank dibawah Kementerian BUMN.

Selama ini pelabuhan Yos Sudarso dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV untuk kegiatan bongkar muat barang dan jasa yang semakin tinggi. Selain itu juga menjadi pelabuhan utama kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang kapal Pelnip maupun perintis yang melayari sebagian besar wilayah di Maluku.

Karena itu, Rini menilai keberadaan pelabuhan utama tersebut sudah tidak layak untuk menangani arus bongkar-muat barang maupun penumpang, karena arealnya semakin sempit dan tidak bisa dikembangkan.

Kementerian BUMN berencana melakukan pembenahan dan perluasan pelabuhan Yos Sudarso Ambon sehingga lebih efisien, di samping menambah fasilitas crane yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas bongkar-muat barang yang terus mengalami peningkatan.

“Tetapi kami merasa pelabuhan Yos Sudarso sudah tidak efektif dan efisien lagi sebagai pelabuhan utama di Ambon dan Maluku, karena arealnya sempit dan tidak bisa dikembangkan lagi,” katanya.

Dia menegaskan, telah menugaskan pimpinan Pelindo IV untuk mencari lokasi lain di luar Kota Ambon untuk membangun pelabuhan baru dan dikhususkan untuk aktivitas bongkar muat barang maupun penumpang.

“Pimpinan Pelindo IV sedang mencari lokasi lain untuk pembangunan pelabuhan baru, sedangkan pelabuhan Yos Sudarso akan dijadikan pelabuhan pariwisata dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya,” katanya.

Menurutnya alih fungsi pelabuhan Yos Sudarso tersebut untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Maluku dan Ambon pada khususnya, dan kapal-kapal pesiar yang berkunjung ke ibu kota provinsi Maluku tersebut dapat bersandar dengan aman dan tidak mengganggu aktivitas bongkar muat maupun naik-turun penumpang.

Pelabuhan baru yang akan dibangun, ujar Rini, akan dilengkapi dengan sarana serta fasilitas pendukung yang lebih layak dan memadai baik untuk kegiatan bongkar muat barang dan jasa maupun penumpang.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada lahan yang luas untuk segera dibangun pelabuhan pengganti Yos Sudarso, sehingga arus bongkar muat barang dari luar Maluku maupun sebaliknya semakin meningkat,” tandas Rini.

Rini juga mendukung pengembangan program Permodalan Nasional Madani (PNM) di Maluku guna menelorkan wirausaha mikro yang tangguh dan mandiri. “Saya memberikan dukungan kepada manajemen PT PNM sebagai



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

perusahaan milik negara untuk mengembangkan program guna mencetak wirausaha-wirausaha mikro, kecil dan menengah di daerah ini,” kata Rini.

Dalam kunjungannya kerja di Ambon Rini juga meninjau nasabah binaan ULaMM PNM Maluku, sekaligus meresmikan kantor PNM Cabang Ambon sebagai koordinator wilayah Provinsi Maluku.

Rini yang didampingi Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dan jajaran Deputi Kementerian BUMN menyatakan PNM perlu diarahkan agar bisa membina wirausaha yang belum dapat berakses ke perbankan.

“Ada empat bank milik BUMN yakni Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank Tabungan Negara (BTN), tetapi terkadang bank-bank ini tidak bisa menerima wirausaha kecil yang berada di pedesaan maupun perkotaan, sehingga dibutuhkan banyak bimbingan,” katanya.

Rini memberikan apresiasi kepada Direktur Utama PT PNM Persero, Parman Nataatmadja bersama jajaran direksi karena berdedikasi untuk mengembangkan program inovatif sekaligus menampung wirausaha baru berkembang dan membina mereka sehingga sukses mengembangkan produk-produk berdaya saing di pasaran.

Wirausaha-wirausaha yang dibina PNM, kata Rini, harus naik kelas.

Para pengusaha yang bergelut di berbagai usaha kecil, lanjutnya, ke depan harus menjadi nasabah empat bank milik BUMN dan PNM bisa melakukan pembinaan dan bimbingan kepada usaha kecil, mikro dan menengah (UKM) yang baru bertumbuh.

“Saya harapkan UKM binaan PNM di Maluku yang saat ini berjumlah sebanyak 100 nasabah, dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun ke depan sudah harus naik kelas, termasuk memiliki tempat tinggal sendiri dan tanah untuk usaha. Saya kira itu harus menjadi target utama,” tandasnya. (AN/RUZ)



Rabu, 24 Februari 2016 06:00

Hari Ini, Sapteno Dilantik Jadi Rektor Unpatti



AMBON - Setelah terpilih sebagai Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof Dr M. J Sapteno SH M.Hum, hari ini dilantik oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir.

Pelantikan Sapteno sebagai Rektor Unpatti Ambon periode 2016-2020 dijadwalkan akan berlangsung di Kantor Kemenristekdikti di Jakarta, pukul 14.00 WIB.

Ketua Komisi Pemilihan Calon Rektor (KPCR) Unpatti Ambon, Yance Setiabudi mengatakan, pihak KPCR selaku lembaga pemilihan rektor secara resmi menerima laporan dari sekretariat Kemenristekdikti soal jadwal pelantikan Sapteno.

Dalam surat yang diterima KPCR disebutkan secara tertulis tentang agenda melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Rektor Unpatti Ambon periode 2016-2020. "Sekitar pukul 12.00 WIT siang ini, (kemarin) kami menerima laporan (Kemenristekdikti). Setelah itu rektor dan KPCR berangkat menuju Jakarta dari Ambon untuk memenuhi undangan pelantikan rektor," kata Yance yang dihubungi Kabar Timur, sore kemarin.

Mantan Rektor Unpatti Prof. Dr. Thomas Pentury juga akan turut menghadiri pelantikan Sapteno. Setelah pelantikan akan dilakukan serah terima jabatan dari Thomas Pentury kepada mantan Rektor Unpatti periode 2011-2016 kepada Sapteno selaku rektor Unpatti periode 2016-2020. "Serah terima jabatan ini akan disaksikan langsung oleh Menristekdikti," imbuhnya.

Selaku ketua KPCR, Yance memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Maluku, khususnya civitas akademika Unpatti yang telah memberikan dukungan positif sehingga seluruh tahapan dalam proses pemilihan rektor Unpatti berjalan dengan baik.

"Semua tahapan pemilihan rektor berjalan sesuai agenda. Ini tidak terlepas dari dukungan kolektif civitas akademika dan secara umum masyarakat Maluku," katanya.

Sapteno terpilih menjadi Rektor Unpatti Ambon periode 2016-2020, setelah mengungguli Thomas Pentury dan Prof Dr Tonny Pariela MA pada 11 Februari 2016.

Hasil suksesi tersebut Sapteno mendapatkan 44 suara, Pentury 37 suara, sedangkan Pariela 13 suara. (KAF)



Rabu, 24 Februari 2016 06:00

Tiga Komisaris Bank Maluku Batal Diperiksa Kejati



SETELAH menaikkan status kasus dugaan korupsi pembelian kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya ke penyidikan, tim jaksa mulai bergerak membidik calon tersangka. Pejabat teras bank pelat merah itu dipanggil untuk diperiksa.

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Maluku mulai memanggil sejumlah pejabat teras di bank milik Pemda Maluku tersebut. Tiga orang dipanggil Selasa (23/2), yakni Isaac (Cak) Saimima, Zainudin Umasangadji dan Johannes Batjeran. Ketiganya merupakan Komisaris PT Bank Maluku.

Mereka dipanggil sebagai saksi untuk dikorek keterangan dalam pengadaan kantor Bank Maluku cabang Surabaya tahun 2014. Kantor yang berada di pusat kota Surabaya tepatnya di jalan Darmo nomor 51 itu senilai Rp 54 miliar.

Namun, tiga petinggi Bank Maluku ini tidak hadir alias mangkir. Seolah telah kompak, tiga pejabat ini beralasan sakit, menghindari panggilan korps Adhyaksa.

Kasipenkum Kejati Maluku Sammy Sapulette menjelaskan, surat permohonan ijin dari Isaac, Zainudin dan Johannes Batjeran sebelumnya sudah disampaikan oleh staf bagian Hukum dan Kepegawaian PT Bank Maluku.

“Zainudin Umasangaji karena sakit, habis bedah hernia. Ada surat keterangan dokter dari RSCM, dr Agie Satrio Putranto, ahli bedah. Isaac Saimima, Johannes Batjeran, juga sakit. Ada surat dokter,” kata Sammy Sapulette kepada wartawan, Selasa (23/2) menjelaskan alasan mangkir tiga saksi tersebut.

Belum dipastikan tanggal berapa, namun juru bicara Kejati Maluku ini menyatakan, pemeriksaan akan dijadwalkan ulang, Maret mendatang. “Kita akan buat surat panggilan ulang untuk pemeriksaan saksi bulan depan (Maret 2016),” kata mantan Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku itu.

Sebagaimana diketahui, Kejati Maluku akhirnya meningkatkan kasus pengadaan atau pembelian lahan dan kantor Bank Maluku Cabang Surabaya ke penyidikan. Pemanggilan ketiga petinggi Bank Maluku itu untuk meminta keterangan mereka selaku saksi.

Sumber Kabar Timur mengungkapkan, yang pertama melaporkan pengadaan kantor Bank Maluku cabang Surabaya adalah Isaac Saimima sendiri. Dilaporkan ke Kejati, karena diduga menyalahi aturan dan sarat rekayasa dengan modus pemahalan harga (mark up).



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Seperti diberitakan sebelumnya, langkah Kejati Maluku menaikkan penyelidikan kasus dugaan mark-up (pemahalan) pembelian Kantor PT Bank Maluku cabang Surabaya ke penyidikan, diapresiasi.

“Naik kelas” dari status penyelidikan ke penyidikan merupakan langkah maju kerja Kejati Maluku dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi di Maluku. “Ini prestasi luar yang ditunggu-tunggu publik Maluku,” kata Abdul Aziz Talaohu, dalam bincang-bincang bersama Kabar Timur, di Jakarta, kemarin.

Aziz putera Maluku yang kini berkiprah sebagai lawyer di Ibu Kota Indonesia ini mengapresiasi kerja Kejati Maluku, yang berniat menuntaskan segudang kasus-kasus dugaan korupsi di Maluku, khususnya kasus mega korupsi di Bank Maluku.

“Artinya dalam pengusutan kasus di Bank Maluku ini, siapapun yang terlibat, tim penyidik kasus ini harus transparan. Tidak perlu ditutup-tutupi, agar publik bisa mengetahui pasti tentang siapa pelaku-pelaku mark-up di Bank Maluku itu,” tandas Azis.

Apalagi, lanjut Azis, ada dugaan pelaku-pelaku yang sejak lama menjadi opini publik tidak hanya orang dalam Bank Maluku, tapi ada pejabat-pejabat teras lain yang juga terbelit dan menjadi inisiator hingga terjadi transaksi pembelian Kantor Cabang Bank Maluku yang berkedudukan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur itu.

Menyoal tentang siapa-siapa pejabat di luar Bank Maluku yang disebut terlibat? Azis mengatakan, publik secara langsung mungkin telah mengetahuinya dari berita-berita media. Hanya saja, untuk membuktikan itu, semua terpulang dari kerja Tim Penyidikan Kejati Maluku yang telah dibentuk Kajati Maluku.

“Yang bisa mengungkap itu hanya ada pada kewenangan penyidik. Penyidik menjadi penentu dalam mengusut kasus Bank Maluku yang sementara ini ditunggu-tunggu publik Maluku. Sebagai pengamat saya hanya mengilustrasi informasi-informasi yang sempat mengemuka di rana publik,” kata dia.

Selanjutnya, tambah dia, proses penyidikan kasus ini merupakan domain tim penyidik Kejaksaan untuk mengembangkan setiap informasi yang ada benang merahnya dengan kasus yang diusut saat ini, yakni: dugaan mark-up pembelian kantor Bank Maluku. Setidaknya, lanjut dia, dengan “naik kelas” kasus ini, penyidik telah mengantongi bukti-bukti yang cukup tentang adanya kerugian Negara. Itu berarti, siapa yang bakal keluar sebagai calon tersangka sudah ada ditangan penyidik. “Makanya saya dorong agar kasus ini dipercepat progress pengusutannya,” tandas Azis menutup.

Sebagaimana diberitakan Kabar Timur sebelumnya, belum tuntas kasus transaksi surat-surat berharga (repo), bernilai Rp 240 miliar di Bank Maluku ditangani Mabes Polri, kini Bank Maluku kembali dililit skandal baru pembelian kantor cabang di Surabaya.

Transaksi pembelian kantor Cabang di Surabaya, baru terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Jadi baru terungkap ada rencana pembelian Kantor Cabang di Surabaya, pada RUPS itu. Sejumlah Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Maluku sebagai pemegang saham tidak setuju,” ungkap sumber Kabar Timur.

Apa yang menjadi penyebab tidak setujunya pemegang saham diantaranya menyangkut nilai pembelian gedung yang dianggarkan cukup fantastis Rp 54 miliar. Sementara nilai jual objek pajak (NJOP) dilokasi lahan dan gedung itu hanya Rp 45 miliar.

“Nilai NJOP bangunan itu Rp 40 miliar. Sementara bangunannya Rp 5 miliar. Tapi dianggarkan atau dibeli Rp 54 miliar. Jika itu terbukti maka ada dugaan markup sebesar Rp 9 miliar dari pembelian lahan dan bangunan kantor untuk cabang Bank Maluku di Surabaya,” bebarnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Kabarnya pembukaan Cabang Bank Maluku di Surabaya belum mendapat restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, OJK menilai pembukaan cabang di Surabaya belum bisa menjadi profit centre, tetapi cost center. Selain itu, lahan dan bangunan yang dibeli hanya berstatus Hak Guna Bangunan atau HGB, sehingga ada kecerobohan.

Menariknya, yang bertandatangan dalam berkas pembelian kantor untuk cabang Bank Maluku di Surabaya itu Gubernur Maluku Said Assagaf dan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy selaku pemegang saham mayoritas di Bank Maluku.

Dalam RUPS yang berlangsung dimana Gubernur Maluku diwakilkan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua yang juga mantan Komisaris Bank Maluku, sempat menuai protes sejumlah bupati yang menjadi pemegang saham di bank plat merah tersebut.

Mereka mempertanyakan kenapa rencana pembelian kantor cabang ini mereka tidak dilibatkan. Namun, mereka berdalih bahwa pembahasan rencana pembelian itu hanya dibahas pemegang saham terbatas.

RUPS itu sempat tegang. Bahkan, sejumlah Bupati dan Walikota sempat mengancam akan mencabut sahamnya. Hanya saja, kabar menyangkut hasil RUPS yang salah satu agendanya membahas pembelian kantor cabang sempat diskorsing dan ditunda keputusannya.

Selain itu, terungkap sertifikat hak guna usaha (HGU) diduga kuat palsu. HGU yang didapat Bank Maluku dari Faizal yang merupakan calo dalam pembelian Kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut, diduga bukan HGU sebenarnya.

Berdasarkan penyelidikan Kejati Maluku, ternyata HGU yang diduga asli dan juga surat-surat tanah lainnya yang masih tertulis dalam Bahasa Belanda, berada di tangan orang lain. “Dalam penyelidikan yang dilakukan pihak kejaksaan, penyidik berhasil menemukan HGU yang diduga asli dan surat-surat bukti kepemilikan lahan Bank Maluku yang masih berbahasa Belanda,” ujar sumber tersebut. (KTA/KTP)